Perhitungan Besaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Standar
Penilaian Indonesia dan Kendala-Kendala Dalam Penerapannya
Ibnu Syukron Alfaher, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Limbong, Bernhard, 2015, *Politik Pertanahan,* Pustaka Margaretha, Jakarta Selatan.

Ediwarman, Monograf, 2011, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi),* Sofmedia, Medan.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* Alumni, Bandung.

Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata Cetakan Pertama,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), 2018, *Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII,* Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang,* Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Binacipta, Bandung.

Sumardjono, M. S. W., 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,* Kompas, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Perhitungan Besaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Standar
Penilaian Indonesia dan Kendala-Kendala Dalam Penerapannya**
Ibnu Syukron Alfaher, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Perhitungan Besaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Standar
Penilaian Indonesia dan Kendala-Kendala Dalam Penerapannya
Ibnu Syukron Alfaher, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1744).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1098).

C. Jurnal dan tesis

Harjono, K. Dhaniswara, 2023, "Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,". Jurnal Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 1. https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/7

Guntoro, Silvester Yoppy, 2023, "Penilaian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", Tesis Program Magister, Universitas Gadjah Mada.

Kertopati, Panji, 2023 "Mekanisme Penilaian Ganti Kerugian Oleh Penilai Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi)", Tesis Program Magister, Universitas Gadjah Mada.

Supriyadi, 2021, "Rekonstruksi kebijakan pengadaan tanah dan kompensasinya guna kepentingan proyek strategis nasional", Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Fakultas Hukum UNISSULA.

Habsyah, Ummi, Hartana, dan Dewi Iryani, 2022, "Tanggung Jawab Hukum Penilai Publik untuk Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum yang Berkepastian Hukum," APPIHI: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (September 2024): 330–344 https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.441.

D. Internet

Heksantoro, Rinto, " Kisah Warga Dapat Ganti Rugi Proyek Bendungan Bener Tak Genap Rp 100 Ribu", diakses dari https://www.detik.com/jateng/berita/d-6481718/kisah-warga-dapat-ganti-rugi-proyek-bendungan-bener-tak-genap-rp-100-ribu pada tanggal 7 Juli 2025 Pukul 21.00 WIB